



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PERHUBUNGAN, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 14 (empat belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 21 Juni 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.30 WIB s.d 18.20 WIB
Tempat	: Ballroom A, Hotel Arya Duta Tugu Tani – Jakarta Pusat
Acara	: Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
Ketua Rapat	: H. Muhidin M. Said
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si.
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah dalam rangka Pembahasan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2013.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi V DPR RI akan mendalami lebih lanjut program kegiatan yang disampaikan pada RKP 2013, dengan alokasi anggaran pada Kementerian Perhubungan sebagai berikut :
 - a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp. 6.085 Miliar, dan
 - b. Badan Pengembangan SDM sebesar Rp. 2.986,2 Miliar.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara dan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan agar menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan melakukan seleksi usulan secara ketat, sehingga tidak ada lagi program/kegiatan yang diragukan *outcome*-nya dapat lolos dalam usulan pada Tahun Anggaran 2013.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara dan Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan agar memeriksa paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2011 dan menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) termasuk pemberian *blacklist* pada penyedia jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan agar perencanaan pembangunan bandar udara terlebih dahulu mempertimbangkan aspek :
 - a. kesiapan lokasi pembangunan termasuk diantaranya persiapan pembebasan tanah, serta aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, khususnya Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
 - b. daerah strategis seperti kawasan perbatasan, *domestic connectivity*, daerah rawan bencana dan daerah pariwisata; dan
 - c. urgensi operasional penerbangan termasuk diantaranya penerbangan perintis.
5. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk segera meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan peralatan pelayanan navigasi penerbangan (ATS) sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk layanan navigasi yang ideal.
6. Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk segera melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan amanah Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan antara lain:
 - a. pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; dan
 - b. pengalihan pelayanan navigasi penerbangan yang selama ini didelegasikan kepada negara lain ke dalam negeri.

7. Komisi V DPR RI meminta...../hal. 3

7. Komisi V DPR RI meminta Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan untuk membangun lembaga pendidikan khususnya bidang pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian di kawasan regional, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan NTT.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

Jakarta, 21 Juni 2012

KETUA RAPAT,

TTD

H. MUHIDIN M. SAID

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA,**

TTD

HERRY BAKTI

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,**

TTD

BOBBY R. MAMAHI